



**BUPATI LAMPUNG TIMUR  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBANGUNAN E-WASDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi informasi belum dimanfaatkan secara maksimal dalam menunjang penyelenggaraan administrasi perkantoran secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan E-WASDA di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBANGUNAN E-WASDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Bagian Kesatu Definisi

##### Pasal 1



Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Badan atau Dinas atau instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan untuk menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk mencapai suatu tujuan.
6. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.
7. *E-WASDA* adalah pengelolaan pengawasan daerah secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalam proses pengambilan keputusan.
8. Jaringan Komputer adalah suatu sistem jaringan berbasis Kabel atau Nir Kabel yang menghubungkan antar bagian dengan aplikasi yang terdapat pada *server*.
9. Komputer *Server* adalah perangkat keras yang menjalankan aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam suatu jaringan (antar komputer).
10. Komputer *Client* adalah komputer yang terhubung dengan jaringan (antar komputer) sehingga dapat mengakses aplikasi pada *server*.
11. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem *E-WASDA* berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*).
12. Piranti elektronik adalah alat-alat elektronik pendukung *E-WASDA*.
13. Metode Enkripsi ialah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan aplikasi tertentu.
14. Hak akses pengguna (*user*) atau kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
15. Kode sandi (*password*) adalah kode sandi yang harus dimasukkan ke dalam suatu sistem komputer yang berupa karakter tulisan, suara, atau ciri-ciri khusus yang harus diingat.
16. *Scanner* adalah piranti elektronik untuk memindai dokumen.



17. Aplikasi Pengawasan Daerah Elektronik adalah suatu sistem aplikasi berbasis web yang dikembangkan dengan menggunakan *development tools* yang bersifat legal.
18. Templat/Borang adalah format/formulir surat yang disusun secara elektronik.

## Bagian Kedua Asas dan Tujuan

### Pasal 2

#### Asas pengelolaan E-WASDA:

- a. manfaat, bahwa penyelenggaraan E-WASDA didasarkan pada nilai manfaat bagi seluruh pihak yang terkait;
- b. produktivitas, bahwa penyelenggaraan E-WASDA dilaksanakan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan efektifitas dalam pengolahan data dan penyediaan informasi;
- c. keterbukaan atau transparansi, bahwa penyelenggaraan E-WASDA berorientasi pada pelayanan informasi kepada publik sebagai sarana untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
- d. validitas, bahwa penyelenggaraan E-WASDA sebagai sarana pengelolaan data dan informasi (pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyajian kembali) yang lengkap, akurat, dan mutakhir;
- e. sinergitas, bahwa penyelenggaraan E-WASDA dilaksanakan dengan saling memanfaatkan sistem lain yang telah ada untuk mengoptimalkan pemanfaatan jaringan;
- f. integrasi, bahwa penyelenggaraan E-WASDA diorientasikan pada keterpaduan sistem informasi guna mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dan pelayanan informasi kepada masyarakat (*public*) melalui sistem jaringan;
- g. efektif dan efisien, bahwa penyelenggaraan E-WASDA dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok maupun fungsi secara efektif dan efisien;
- h. otorisasi, bahwa penyelenggaraan E-WASDA terkait pemilikan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- i. keamanan dan keandalan, bahwa penyelenggaraan E-WASDA harus mempertimbangkan faktor keamanan informasi, menjamin keamanan dan keandalan informasi yang diolah, disampaikan, dan disajikan.



### Pasal 3

Pengelolaan *E-WASDA* bertujuan untuk:

- a. menciptakan efektifitas dan efisiensi kerja administrasi perkantoran melalui mekanisme penyediaan dan akses data dan informasi berbasis teknologi informasi;
- b. menciptakan kesamaan persepsi antar OPD dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui aplikasi *E-WASDA* dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan sasaran kerja pegawai; dan
- c. mewujudkan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* melalui penyelenggaraan *e-government*.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Pembangunan *E-WASDA*, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pengendalian; dan
- d. pelaporan.

### Bagian Kedua Perencanaan

#### Pasal 5

- (1) Perencanaan dalam pembangunan *E-WASDA* dimulai dari perancangan arsitektur desain sistem, perencanaan program dan kegiatan, perencanaan tata kelola keuangan, dan perencanaan tata usaha perkantoran.
- (2) Perancangan arsitektur desain sistem *E-WASDA* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. arsitektur penyelenggaraan *E-WASDA*;
  - b. cakupan system *E-WASDA*;
  - c. alur kerja *E-WASDA*; dan
  - d. persyaratan penerapan *E-WASDA*.

#### Pasal 6

Arsitektur penyelenggaraan *E-WASDA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan sistem yang terhubung dengan jaringan komputer yang dapat diakses semua pengguna.



#### Pasal 7

- (1) Cakupan system sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- a. komunikasi internal dan eksternal;
  - b. Kondisi obyek pemeriksaan
  - c. penyelenggaraan program dan kegiatan; dan
  - d. pengaduan masyarakat.

#### Pasal 8

- (1) Alur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. alur ketatausahaan [input data, surat perintah tugas] ;
  - b. alur penyelenggaraan pemeriksaan; dan
  - c. alur pengelolaan hasil pemeriksaan ( tindak lanjut hasil pemeriksaan ]

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan penerapan *E-WASDA* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
- a. persyaratan infrastruktur; dan
  - b. persyaratan suprastruktur.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan *E-WASDA* terdiri dari:
- a. perumusan, pembuatan, perancangan arsitektur dan desain sistem *E-WASDA* yang dapat menggunakan *Jasa Programmer* dan/atau *Informasi Teknologi*;
  - b. pembuatan program kerja pengawasan tahunan, serta data pemeriksaan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan kembali secara terorganisir dan terarsipkan;
  - c. penyusunan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan kembali secara terorganisir dan terarsipkan;
- (2) Pelaksanaan *E-WASDA* harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di atasnya.

### Bagian Keempat Pengendalian

#### Pasal 11

- (1) Pengendalian dalam pengelolaan *E-WASDA* terdiri dari pemantauan atau monitoring dan evaluasi.



(2) Bentuk pengendalian dalam penyelenggaraan E-WASDA meliputi:

- a. pemantauan dan evaluasi terhadap Tindak Lanjut temuan pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan;
- b. pemantauan dan evaluasi terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan;
- c. pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan organisasi perangkat daerah dalam hal surat-menyurat melalui tata naskah kedinasan yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan;
- d. pemantauan dan evaluasi terhadap disiplin pegawai dan sasaran kerja pegawai pada tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran sebelumnya yang dapat disimpan dan dilakukan pemanggilan data secara terorganisir dan terarsipkan; dan
- e. pemantauan, pemeliharaan, dan evaluasi terhadap kondisi perangkat keras (jaringan komputer) dan perangkat lunak (aplikasi E-WASDA) setiap akhir tahun anggaran.

(3) Pengendalian E-WASDA harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di atasnya.

Bagian Keempat  
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Pelaporan dalam pengelolaan E-WASDA terdiri dari:
  - a. laporan hasil pemeriksaan;
  - b. laporan kinerja penyerapan anggaran;
  - c. laporan kinerja ketatausahaan organisasi; dan
  - d. laporan tidak lanjut pemeriksaan.
- (2) Penyampaian laporan hasil pembangunan E-WASDA disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan, standarisasi, pedoman, manual dan kriteria yang berlaku.

BAB III  
KEDUDUKAN, ORGANISASI, DAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kedudukan



### Pasal 13

- (1) Inspektur membentuk pengelola *E-WASDA* yang bersifat mandiri dan melekat pada masing masing Bidang.
- (2) Pengelola *E-WASDA* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Timur.

### Bagian Kedua Organisasi

### Pasal 14

- (1) Susunan organisasi pembangunan *E-WASDA* terdiri dari:
  - a. administrator (*admin*);;
  - b. verifikator;
  - c. operator data; dan
  - d. operator pengaduan masyarakat.
- (2) Penunjukan pembangunan *E-WASDA* ditetapkan dalam Keputusan inspektur.

### Bagian Ketiga Tugas dan Tanggungjawab

### Pasal 15

- (1) Administrator (*admin*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
  - a. menjaga dan memastikan keamanan jaringan komputer agar tetap berfungsi dengan baik dan normal;
  - b. mengatur seluruh aktifitas jaringan, mulai dari pengguna jaringan komputer (operator data, operator media informasi dan komunikasi, serta operator layanan pengaduan masyarakat), maupun sistem aplikasi;
  - c. membuat *user account* bagi pengguna aplikasi dan jaringan komputer (operator data, operator media informasi dan komunikasi, serta operator layanan pengaduan masyarakat);
  - d. menata kelola data mulai dari penerimaan data yang masuk, data keluar, sampai dengan *backup* data/cadangan file;
  - e. melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan pembaharuan (*update*) sistem aplikasi dan jaringan komputer; dan
  - f. melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui inspektur.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi atas pemohon sebagai calon pengguna aplikasi *E-WASDA* (operator data, operator media informasi dan komunikasi, serta



operator layanan pengaduan masyarakat), dan jaringan komputer;

- b. melakukan verifikasi atas data masuk (*input data*) dan data keluar (*ouput data*) dalam sistem aplikasi *E-WASDA* dan jaringan komputer;
- c. menerima dan/atau menolak atas penggunaan sistem aplikasi *E-WASDA* dan jaringan komputer apabila dianggap tidak sesuai;
- d. menyerahkan hasil verifikasi kepada *admin* untuk dibuatkan *user account*; dan
- e. melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui inspektur.

(3) Operator Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melakukan pengolahan data untuk dimasukan kedalam sistem aplikasi *E-WASDA*;
- b. menyimpan data hasil pengolahan dalam aplikasi sistem *E-WASDA*;
- c. memanggil data hasil pengolahan dalam aplikasi sistem *E-WASDA*;
- d. berkoordinasi dengan admin dalam rangka integrasi sistem kerja *E-WASDA*;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan *input* dan *output* data; dan
- f. melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui inspektur.

(4) Operator Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melakukan input data (tanggapan OPD) atas adanya pengaduan yang bersifat informasi dari masyarakat;
- b. melakukan koordinasi kepada inspektur pembantu atas adanya pengaduan yang bersifat informasi dari masyarakat;
- c. memberikan jawaban melalui sistem aplikasi *E-WASDA* atas pengaduan dari masyarakat, atas se-ijin inspektur;
- d. melakukan pemantauan pada sistem aplikasi *E-WASDA* dan berkoordinasi dengan admin apabila terjadi masalah sistem maupun jaringan komputer; dan
- e. melaporkan hasil kerja kepada Bupati melalui inspektur.



## BAB IV PENGAMANAN DATA

### Pasal 16

#### (1) PELAPORAN DAN PENGAMANAN DATA

##### A. LAPORAN BERKALA

Laporan berkala Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilakukan setiap triwulan 1, 2, 3 dan 4 kepada Inspektur Kabupaten Lampung Timur.

##### B. LAPORAN INSIDENTIL

Laporan insidentil untuk kepentingan tertentu atau atas permintaan Inspektur Kabupaten Lampung Timur bentuk dan isinya serta batas waktu penyampaian disesuaikan dengan substansi keperluannya

##### C. PENGAMANAN DATA

Langkah langkah pengamanan database yang dilakukan oleh Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- Setiap akhir periode laporan berkala Tim Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan membuat back up database hasil Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- Kasubag evaluasi dan inspektur pembantu bertanggung jawab atas pengamanan data Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan; Petugas yang berwenang untuk membuka database serta tingkat kewenangannya ditetapkan oleh Inspektur Kabupaten Lampung Timur;
- Mengawasi kerahasiaan penggunaan user id yang diberikan kepada Tim Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- Menyiapkan prosedur standar penanggulangan virus yang wajib dijalankan oleh setiap pengguna sistem komputer.

## BAB V PERUBAHAN/ PERBAIKAN DATABASE

### Pasal 17

- Perubahan/ perbaikan database dilakukan apabila telah dilakukan
- updating data tindak lanjut dengan Tim tindak lanjut Auditor.
- Perubahan/ perbaikan database elektronik dilakukan melalui aplikasi atas persetujuan dari *inspektur pembantu*.



**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan *E-WASDA* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan *E-WASDA* pada unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

**BAB VII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 19**

Kepala Dinas/Badan/Bagian/Kantor melaporkan pelaksanaan *E-WASDA* kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten pada akhir tahun anggaran.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 November 2018

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**CHUSNUNIA**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 12 November 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

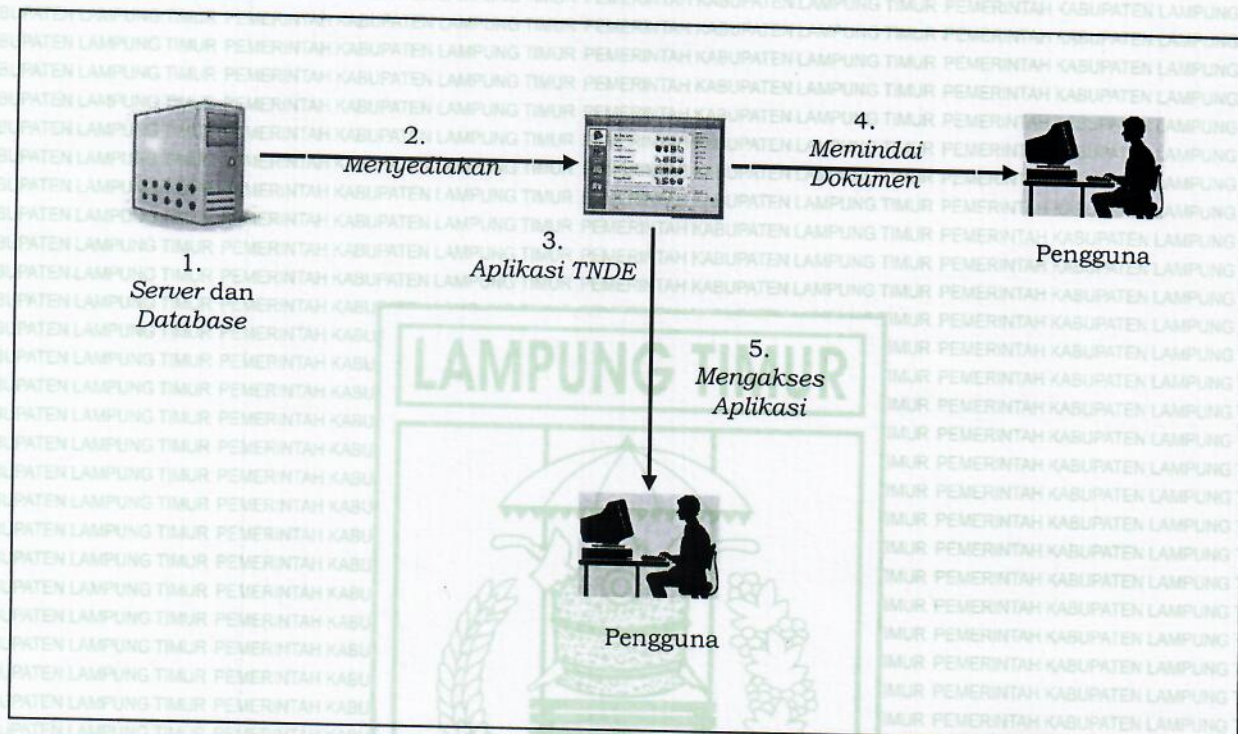
  
**SYAHRUDIN PUTERA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 103**



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBANGUNAN E-WASDA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

ALUR KERJA SISTEM E-WASDA  
UNTUK KETATAUSAHAAN



Penjelasan gambar Arsitektur E-WASDA adalah sebagai berikut:

1. Komputer Induk (server) dan basis data (database) merupakan infrastruktur untuk meng-install dan menyimpan data aplikasi.
2. Komputer Induk (server) dan basis data (database) menyediakan aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer, baik intranet maupun internet.
3. Petugas dapat melakukan pemindaian (scanning) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
4. Setiap pengguna dapat menggunakan aplikasi melalui komputer.

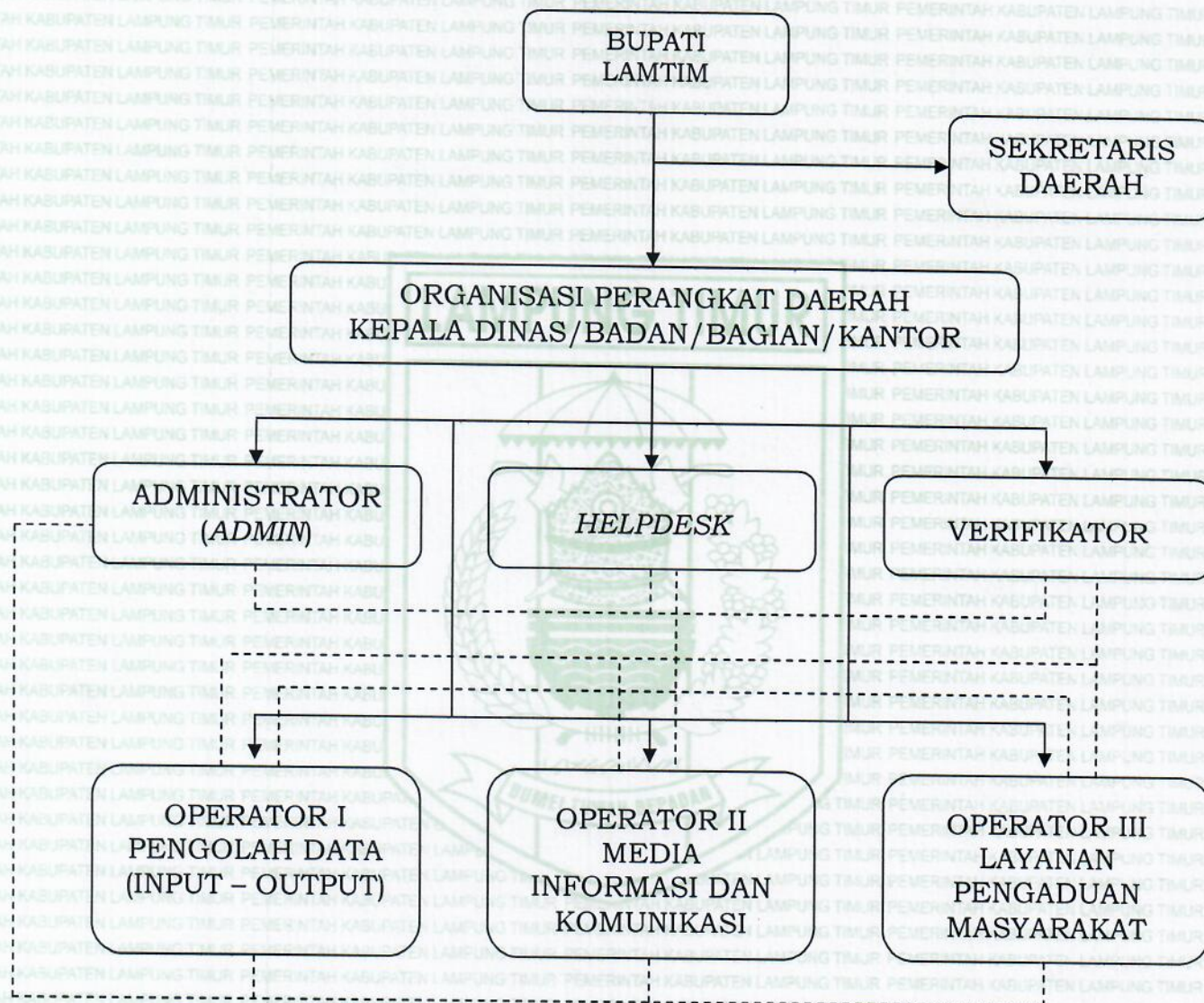
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA



LAMPIRAN II  
NOMOR 41 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBANGUNAN E-WASDA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

STRUKTUR ORGANISASI  
PEMBANGUNAN E-WASDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



Keterangan:



Garis Perintah



Garis Koordinasi

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

CHUSNUNIA